Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4994-5004
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4994-5004
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Optimalisasi Capaian *Output* yang Akuntabel untuk Peningkatan Mutu Pendidikan dan Layanan di IAIN Parepare

Akmal Ibrahim[1], Yessicka Noviasmy[2]
[1,2] Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia
Email : akmalibrahim@iainpare.ac.id [1], yessickanoviasmy@iainpare.ac.id [2]

Abstrak

IAIN Parepare menghadapi tantangan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar dikonversi menjadi capaian output yang terukur dan akuntabel, sebagaimana tercermin pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengabdian ini bertujuan memperkuat akuntabilitas pengelolaan capaian output kinerja bersama tim keuangan dan tim perencanaan melalui pendekatan partisipatif. Metode yang digunakan adalah *Asset Based Community Development* (ABCD) yang dipadukan dengan *Gap Analysis*, melalui lima tahap: *Appreciative Inquiry (Discovery)*, *Asset Mapping*, *Co-Design*, *Implementation and Mobilization*, serta *Monitoring and Sustainability*. Kegiatan utama meliputi *Focus Group Discussion* (FGD) pada 11 September 2026 yang diikuti 15 peserta dengan narasumber dari KPPN Parepare, pengembangan aplikasi monitoring capaian output kinerja pada modul SIPERINTIS di platform Kampus Cerdas LTE, serta sosialisasi dan praktik penggunaan aplikasi. Hasilnya berupa empat masukan prioritas dari FGD (rencana kegiatan rinci dengan RPD bulanan, pemutakhiran target penarikan dana, ketepatan waktu dan penilaian kinerja, serta instrumen monitoring internal), tersedianya aplikasi dengan dashboard dan fitur IKPA Capaian Output, dan terlaksananya praktik penggunaan oleh peserta. Evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif tanpa *pre-test* dan *post-test*, sehingga peningkatan kompetensi dan nilai IKPA belum dapat dinyatakan secara terukur. Pengabdian ini memberikan dasar penguatan kapasitas dan sarana monitoring digital yang keberlanjutannya bergantung pada kesiapan pengguna, kejelasan penanggung jawab pengelolaan, dan dukungan kelembagaan.
Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Capaian *Output*, IKPA, ABCD, Aplikasi *Monitoring*.

Abstract

IAIN Parepare faces the challenge of ensuring that allocated budgets are converted into measurable and accountable output achievements, as reflected in the Budget Implementation Performance Indicator (IKPA). This community service aims to strengthen the accountability of output performance management together with the finance and planning teams through a participatory approach. The method combines Asset Based Community Development (ABCD) with Gap Analysis through five stages: Appreciative Inquiry (Discovery), Asset Mapping, Co-Design, Implementation and Mobilization, and Monitoring and Sustainability. The main activities were a Focus Group Discussion (FGD) on 11 September 2026 attended by 15 participants with a speaker from the Parepare State Treasury Service Office (KPPN), the development of an output performance monitoring application on the SIPERINTIS module of the Kampus Cerdas LTE platform, and the socialization and hands-on use of the application. The FGD produced four priority inputs (detailed activity plans with monthly fund withdrawal plans, regular updates of withdrawal targets, timeliness and performance assessment, and an internal monitoring instrument); the

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

application with a dashboard and an IKPA Output Achievement feature was delivered, and participants tried the application directly. The evaluation was descriptive-qualitative without pre-test and post-test, so improvements in competence and IKPA scores cannot yet be stated quantitatively. This initiative provides a foundation for capacity building and a digital monitoring tool whose sustainability depends on user readiness, clear management responsibility, and institutional support.
Keywords: *Performance Accountability, Output Achievement, IKPA, ABCD (Asset Based Community Development), Monitoring Application.*

PENDAHULUAN

Dalam ekosistem pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga merupakan manifestasi dari tujuan strategis lembaga dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan, kualitas tata kelola, dan efektivitas layanan kelembagaan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya pencapaian kinerja institusi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi keagamaan negeri, menjadikan perencanaan program dan anggaran sebagai instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Namun, tantangan yang masih perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam pelaksanaan kegiatan serta menghasilkan capaian output yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan tersebut menunjukkan perlunya pergeseran paradigma pengelolaan anggaran dari orientasi penyerapan (*spending oriented*) menuju pengelolaan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Dalam paradigma ini, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga oleh kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian output yang dihasilkan. Capaian output menjadi indikator penting yang merepresentasikan keterhubungan antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan salah satu komponen penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu kesesuaian realisasi fisik barang dan jasa dengan sasaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta keteraturan penyampaian data yang akurat dan tepat waktu (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Dengan demikian, ketidaksesuaian antara target dan realisasi output, termasuk keterlambatan dan ketidakakuratan pelaporan, tidak hanya berimplikasi terhadap penilaian kinerja anggaran, tetapi juga dapat mengindikasikan adanya persoalan dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat institusi.

Permasalahan pengelolaan capaian output tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang saling berkaitan. Secara umum, terdapat tiga kesenjangan utama yang perlu diperhatikan. Pertama, kesenjangan prosedural dan dokumentasi, yang ditandai oleh ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan administrasi dan pelaporan, termasuk ketepatan waktu serta kelengkapan bukti dukung capaian output. Kedua, kesenjangan kompetensi dan literasi digital, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap regulasi, mekanisme pelaporan kinerja, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan anggaran. Ketiga, kesenjangan budaya organisasi, khususnya dalam membangun orientasi kerja yang tidak hanya menekankan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, perbedaan kewenangan, akses informasi, dan kapasitas teknis antara unsur pimpinan, tim perencanaan, dan pengelola keuangan berpotensi menimbulkan hambatan koordinasi apabila tidak didukung oleh pola komunikasi dan mekanisme kerja yang efektif.

Apabila persoalan tersebut tidak ditangani melalui kajian dan pendampingan yang sistematis, peningkatan alokasi anggaran setiap tahun belum tentu berbanding lurus dengan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

peningkatan kualitas kinerja dan layanan institusi. Padahal, pengelolaan anggaran yang baik semestinya mampu menjamin bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan nilai kemanfaatan yang optimal (*value for money*) bagi institusi dan seluruh sivitas akademika. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas pengelola anggaran dan pelaporan capaian output menjadi kebutuhan strategis untuk membangun tata kelola kelembagaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, IAIN Parepare memiliki sejumlah potensi kelembagaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain sumber daya manusia yang berpengalaman, struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan dan keuangan, sistem informasi pengelolaan keuangan, dukungan teknologi, serta jejaring koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam membangun mekanisme pengelolaan kinerja yang lebih terintegrasi. Namun, optimalisasi berbagai sumber daya tersebut memerlukan pendekatan yang mampu mempertemukan para pemangku kepentingan, mengidentifikasi hambatan secara bersama, serta menghasilkan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual institusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada penguatan kapasitas pengelolaan kinerja dan akuntabilitas pelaporan capaian output melalui pendekatan partisipatif. Tim keuangan dan tim perencanaan IAIN Parepare ditempatkan sebagai mitra yang berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, memetakan kesenjangan, dan merumuskan strategi perbaikan. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan prinsip *Asset-Based Community Development* (ABCD) dengan *Gap Analysis*. Prinsip ABCD digunakan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset serta potensi kelembagaan yang telah dimiliki, sedangkan *Gap Analysis* digunakan untuk memetakan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal dalam pengelolaan serta pelaporan capaian output. Integrasi kedua pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan identifikasi masalah, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya internal sebagai dasar penyusunan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan, yaitu sosialisasi regulasi secara satu arah, pendampingan teknis secara individual, serta pendekatan partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dikombinasikan dengan penguatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi. Sosialisasi satu arah relatif efisien dari segi pelaksanaan, tetapi memiliki keterbatasan dalam menggali persoalan spesifik yang dihadapi setiap unit kerja. Sementara itu, pendampingan individual memungkinkan identifikasi masalah secara lebih mendalam, tetapi membutuhkan alokasi waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan, ketersediaan sumber daya, serta dana hibah pengabdian sebesar Rp12.000.000, strategi yang dipilih adalah FGD partisipatif, sosialisasi aplikasi monitoring, dan pendampingan tindak lanjut. Strategi ini dipandang lebih relevan karena memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyamaan persepsi, identifikasi hambatan, serta perumusan langkah perbaikan secara kolaboratif.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui FGD pada 11 September 2026 dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran dan pelaporan capaian output di lingkungan IAIN Parepare. Secara substantif, kegiatan ini diarahkan untuk menjawab empat persoalan utama, yaitu bagaimana meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola dalam menyelaraskan perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan capaian output secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel; bagaimana mengoptimalkan koordinasi dan sumber daya kelembagaan dalam mengatasi hambatan administratif, teknis, dan prosedural; bagaimana pendampingan dan diskusi partisipatif dapat menghasilkan langkah perbaikan yang aplikatif untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya capaian output; serta bagaimana membangun komitmen bersama dan mekanisme tindak lanjut bagi pengelolaan kinerja berbasis hasil secara berkelanjutan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Sejalan dengan fokus tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai faktor penghambat (*bottleneck*) yang bersifat struktural, administratif, dan teknis dalam pencapaian serta pelaporan output kinerja; merumuskan strategi mitigasi dan memperkuat mekanisme monitoring capaian output, termasuk melalui pengenalan aplikasi monitoring; mendorong peningkatan mutu layanan kelembagaan melalui penguatan manajemen berbasis hasil; serta membangun budaya akuntabilitas dan integritas kinerja melalui pendampingan dan komitmen tindak lanjut. Dalam proses pelaksanaannya, sejumlah risiko, seperti perbedaan tingkat pemahaman peserta, keterbatasan waktu, dominasi pandangan tertentu, dan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi, diantisipasi melalui penggunaan instrumen diskusi terstruktur, fasilitasi partisipasi yang seimbang, dokumentasi hasil kegiatan, dan penguatan tindak lanjut oleh tim pengabdi.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak diarahkan pada pelaksanaan audit keuangan, pemeriksaan kepatuhan secara menyeluruh, ataupun perubahan kebijakan anggaran secara langsung, melainkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, dan sistem monitoring capaian output. Kontribusi yang diharapkan adalah terbentuknya pemahaman bersama mengenai pentingnya pengelolaan anggaran berbasis hasil, tersusunnya strategi mitigasi terhadap hambatan pencapaian output, serta berkembangnya mekanisme pelaporan yang lebih terukur dan akuntabel. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi praktik baik (*best practice*) dalam penguatan tata kelola kinerja dan akuntabilitas anggaran yang dapat diadaptasi oleh unit kerja lain di lingkungan PTKIN.

Kajian Terdahulu yang Relevan / *Literature Review*

Pengabdian ini berdiri di atas tiga kelompok rujukan. Pertama, regulasi dan pedoman pengelolaan kinerja anggaran, yaitu penilaian IKPA (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022), tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023b), ketentuan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023a), laporan tren kinerja pelaksanaan anggaran (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023), serta pedoman penyusunan rencana strategis satuan kerja (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021; IAIN Parepare, 2024). Rujukan ini menegaskan bahwa capaian output dan ketepatan pelaporan menjadi bagian dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Kedua, literatur manajemen kinerja dan akuntabilitas publik. Kerangka *balanced scorecard* menekankan keselarasan antara strategi dan ukuran kinerja (Kaplan & Norton, 1992, 2006), sedangkan akuntansi sektor publik menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip dalam pengelolaan dana publik (Halim & Kusufi, 2020). Perspektif *new public service* menekankan pelayanan publik yang melibatkan warga dan bertanggung jawab, bukan sekadar mengendalikan (Denhardt & Denhardt, 2015). Ketiga, literatur pemberdayaan dan teknologi informasi: ABCD (Kretzmann & McKnight, 1993), kerangka modal komunitas (Emery & Flora, 2006), pembelajaran dalam komunitas praktik (Wenger, 1998), serta keberhasilan dan penerimaan sistem informasi (DeLone & McLean, 2003; Venkatesh et al., 2003).

Kebaruan pengabdian ini terletak pada perpaduan tiga hal dalam satu rangkaian: forum partisipatif (FGD) bersama narasumber KPPN, pengembangan instrumen monitoring digital yang menjawab kebutuhan yang muncul dari forum tersebut, dan praktik langsung penggunaannya. Pendekatan ini berbeda dari sosialisasi regulasi satu arah yang tidak memberi ruang bagi peserta untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.

Konsep atau Teori yang Relevan

Pendekatan ABCD yang dikembangkan Kretzmann dan McKnight (1993) menekankan bahwa pengembangan komunitas sebaiknya dimulai dari kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang telah dimiliki. Dalam konteks ini, pengalaman tim keuangan dan tim perencanaan menjadi aset utama untuk memahami kebutuhan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

pengelolaan capaian output. Emery dan Flora (2006) menjelaskan bahwa kapasitas komunitas dapat diperkuat melalui keterhubungan berbagai bentuk modal, terutama modal manusia dan sosial.

Dari perspektif partisipasi, Arnstein (1969) membedakan tingkatan keterlibatan, mulai dari penerimaan informasi hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan, sedangkan Bryson et al. (2006) menekankan pembagian peran, pengelolaan hubungan antarpihak, dan mekanisme akuntabilitas dalam kolaborasi lintas organisasi. Untuk aspek teknologi, *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989) menempatkan persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sebagai faktor penerimaan teknologi, dan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (Venkatesh et al., 2003) menambahkan pengaruh sosial dan kondisi pendukung. Kerangka-kerangka ini digunakan untuk membaca hasil pengabdian secara hati-hati, yaitu membedakan antara luaran yang telah dihasilkan dan perubahan yang masih memerlukan pembuktian.

METODOLOGI PENGABDIAN

Pengabdian dilaksanakan di lingkungan IAIN Parepare, Jalan Amal Bhakti Nomor 8, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada tahun 2026. Subjek dampingan adalah tim keuangan dan tim perencanaan IAIN Parepare, yang berperan langsung dalam penyusunan program, pengelolaan anggaran, dan pelaporan capaian output. FGD dilaksanakan pada 11 September 2026 di Meeting Room Reital Territory Cafe, Kota Parepare, dengan 15 peserta dan satu narasumber dari KPPN Parepare. Kegiatan didukung dana hibah pengabdian sebesar Rp12.000.000.

Pendekatan yang digunakan adalah ABCD yang dipadukan dengan *Gap Analysis* untuk menelaah kesenjangan antara kondisi pengelolaan kinerja yang diharapkan dan kebutuhan perbaikan. Pelaksanaan mengikuti lima tahap. Tahap pertama, *Appreciative Inquiry (Discovery)*, berupa rapat koordinasi tim, penyamaan persepsi tujuan dan sasaran, serta penyusunan instrumen FGD. Tahap kedua, *Asset Mapping*, memetakan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, jejaring kerja sama, dan teknologi informasi. Tahap ketiga, *Co-Design*, dilakukan melalui FGD dan pendalaman materi bersama narasumber KPPN untuk merumuskan prioritas perubahan.

Tahap keempat, *Implementation and Mobilization*, berupa pengembangan aplikasi monitoring capaian output kinerja dengan melibatkan tenaga berkompetensi teknologi informasi serta sosialisasi dan praktik penggunaan aplikasi. Tahap kelima, *Monitoring and Sustainability*, berupa pengamatan langsung, refleksi, dan penyusunan tindak lanjut. Data dikumpulkan melalui koordinasi awal, FGD (dicatat dalam resume kegiatan), dan pengamatan langsung selama sosialisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan masukan peserta, aset kelembagaan, dan tujuan pengabdian. Evaluasi bersifat deskriptif kualitatif melalui diskusi partisipatif, masukan langsung, dan observasi, tanpa *pre-test* maupun *post-test*.

Matriks Perencanaan Operasional Pengabdian

Matriks pada Tabel 1 merangkum hubungan antara tahapan, aktivitas, luaran, aset yang dimobilisasi, dan penanggung jawab, sehingga setiap tahap memiliki bukti pelaksanaan yang dapat ditelusuri.

Tabel 1. Matriks Perencanaan Operasional Pengabdian

Tahapan Pengabdian	Aktivitas Utama	Output / Target	Aset yang Dimobilisasi	Penanggung Jawab
Tahap I: *Discovery*	Rapat koordinasi, penyamaan persepsi, dan penyusunan instrumen FGD	Instrumen FGD dan rencana kegiatan	Aset manusia (tim pengabdi)	Tim pengabdi

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Tahapan Pengabdian	Aktivitas Utama	Output / Target	Aset yang Dimobilisasi	Penanggung Jawab
Tahap II: *Asset Mapping*	Pemetaan SDM, dukungan kelembagaan, jejaring, dan teknologi informasi	Pemetaan aset dan kesenjangan	Aset manusia, sosial, fisik, finansial	Tim pengabdi
Tahap III: *Co-Design*	FGD dan pendalaman materi bersama narasumber KPPN	Resume FGD dan prioritas perubahan	Pengalaman tim keuangan dan perencanaan; jejaring KPPN	Tim pengabdi, tim keuangan, tim perencanaan, KPPN Parepare
Tahap IV: *Implementation and Mobilization*	Pengembangan aplikasi monitoring; sosialisasi dan praktik	Aplikasi monitoring dan praktik pengguna	Sarana TI, dana hibah, tenaga pengembang	Tim pengabdi dan tenaga pengembang aplikasi
Tahap V: *Monitoring and Sustainability*	Pengamatan, refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut	Catatan evaluasi dan rekomendasi keberlanjutan	Aset sosial dan fisik	Tim pengabdi dan pihak terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Subjek Dampingan

IAIN Parepare berawal dari Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin yang berdiri di Parepare pada 1967, bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada 1997, dan beralih status menjadi IAIN Parepare pada 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018. Perubahan status ini diikuti perkembangan struktur organisasi dan kebutuhan administrasi yang lebih terkoordinasi. Tim perencanaan berperan dalam penyusunan program, penetapan target, dan penyelarasan kebutuhan kegiatan dengan anggaran, sedangkan tim keuangan menjalankan administrasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kesesuaian antara rencana, realisasi, dan pelaporan capaian output bergantung pada hubungan kerja kedua tim ini.

Pemetaan Aset

Pemetaan menunjukkan empat kategori aset yang paling relevan, yaitu manusia, sosial, fisik, dan finansial (Tabel 2); aset alam tidak menjadi prioritas karena kegiatan berada dalam konteks administrasi dan tata kelola kelembagaan. Aset manusia berupa pengetahuan dan pengalaman kerja kedua tim, ditambah tenaga berkompetensi teknologi informasi yang terlibat dalam pengembangan aplikasi. Aset sosial berupa hubungan koordinasi antartim dan jejaring dengan KPPN Parepare. Aset fisik berupa sarana kerja dan dukungan teknologi informasi, sedangkan aset finansial berupa dana hibah pengabdian.

Tabel 2. Pemetaan Aset Komunitas Dampingan

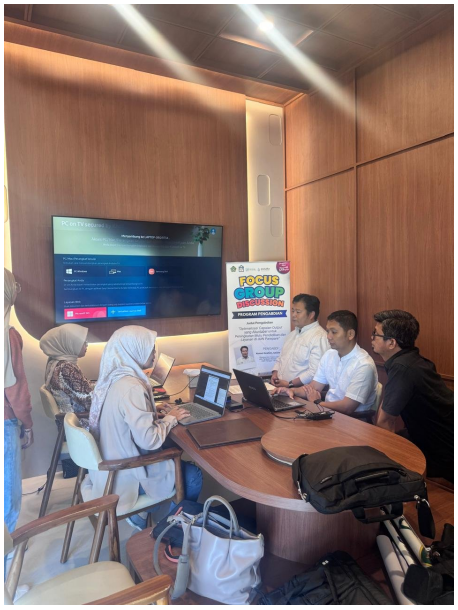
Jenis Aset	Bentuk Aset	Pemilik/Pengelola	Peluang Mobilisasi
Manusia	Pengetahuan dan pengalaman dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan kinerja	Tim keuangan dan tim perencanaan IAIN Parepare	Pertukaran pengetahuan, identifikasi kebutuhan, dan penguatan kapasitas

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Jenis Aset	Bentuk Aset	Pemilik/Pengelola	Peluang Mobilisasi
Sosial	Hubungan koordinasi antartim dan jejaring dengan KPPN Parepare	Unit terkait di IAIN Parepare dan mitra eksternal	Penguatan komunikasi, pendalaman teknis, dan penyusunan alternatif perbaikan
Fisik	Sarana kerja dan dukungan teknologi informasi	IAIN Parepare	Pendukung pengembangan dan pemanfaatan aplikasi monitoring
Finansial	Dana hibah pengabdian Rp12.000.000	Tim pengabdi sesuai ketentuan program bantuan	Pembiayaan kegiatan, penguatan kapasitas, dan tindak lanjut

Hasil FGD dan Prioritas Perubahan

FGD melibatkan 15 peserta dari tim keuangan dan tim perencanaan serta satu narasumber KPPN Parepare yang memberikan pendalaman mengenai perencanaan penarikan dana, ketepatan waktu pelaporan, dan pengendalian capaian output (Gambar 1). Resume kegiatan mencatat empat pokok pembahasan: (1) penyusunan rencana kegiatan yang rinci melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan, (2) pemutakhiran target penarikan dana secara berkala, (3) peningkatan perhatian terhadap ketepatan waktu dan penilaian kinerja, dan (4) kebutuhan instrumen monitoring dan evaluasi internal untuk capaian output.



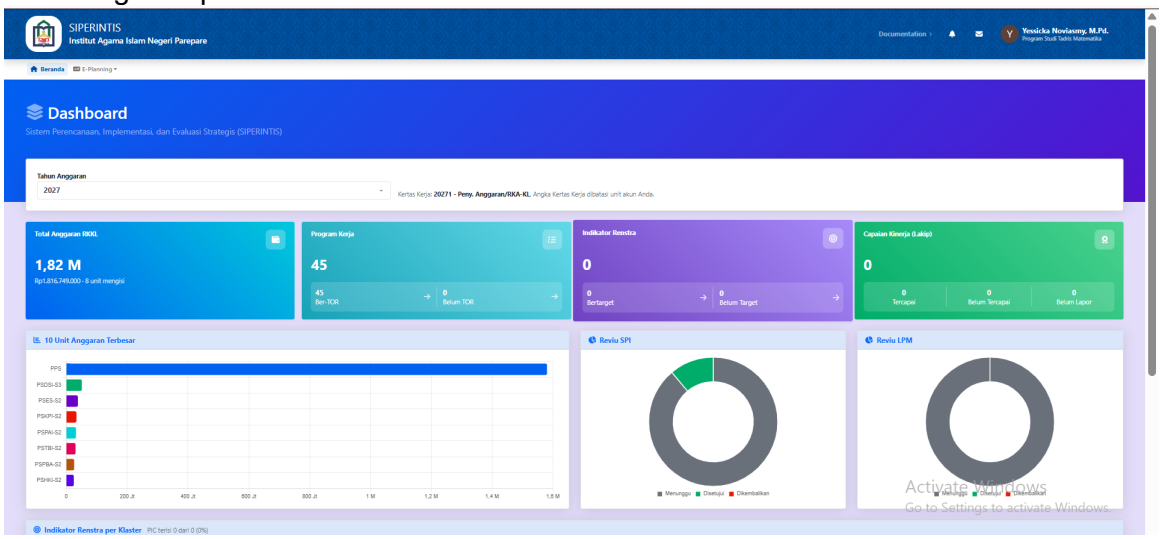
Gambar 1. Pelaksanaan FGD dan Pendalaman Materi oleh Narasumber KPPN Parepare

Dari keempat pokok tersebut tim pengabdi menetapkan tiga prioritas perubahan: penguatan sinkronisasi antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran; penguatan ketepatan waktu dan akuntabilitas pelaporan capaian output; serta penyediaan instrumen monitoring dan evaluasi internal. Penetapan dilakukan melalui sintesis tim pengabdi terhadap masukan terdokumentasi dan aset yang teridentifikasi, dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tujuan, kebutuhan pengelolaan kinerja, ketersediaan sumber daya, dan kelayakan tindak lanjut. Validasi dilakukan melalui penelaahan kesesuaian catatan diskusi dengan kebutuhan pengabdian; pengesahan formal atas temuan oleh seluruh peserta tidak dilakukan secara khusus.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Pengembangan Aplikasi Monitoring Capaian Output Kinerja

Kebutuhan instrumen monitoring internal yang muncul dalam FGD dijawab dengan mengembangkan aplikasi monitoring capaian output kinerja yang tersedia pada modul SIPERINTIS di platform Kampus Cerdas LTE IAIN Parepare (https://kampuscerdas.com/gate/menu). Pengembangan dikoordinasikan tim pengabdi dengan melibatkan tenaga berkompetensi teknologi informasi. Dashboard utama menyajikan Total Anggaran RKKL, Program Kerja, Indikator Renstra, dan Capaian Kinerja (LAKIP) dalam satu tampilan (Gambar 2). Fitur Capaian Output per Rincian Output (IKPA Capaian Output) menampilkan komponen ketepatan waktu pelaporan, capaian Rincian Output (RO), serta status pelaporan berdasarkan periode dan unit kerja, dilengkapi informasi validasi untuk mengenali potensi ketidaksesuaian data.



Gambar 2. Tampilan Dashboard Utama Aplikasi Monitoring Capaian Output Kinerja

Sosialisasi dan Praktik Pemanfaatan Aplikasi

Sosialisasi dilakukan melalui penjelasan fungsi aplikasi, demonstrasi, dan praktik langsung. Peserta mengakses dan mencoba fitur untuk menelusuri informasi program kerja, anggaran, indikator kinerja, dan capaian output, sementara tim pengabdi mendampingi dan mengamati interaksi peserta dengan aplikasi (Gambar 3). Praktik langsung memungkinkan peserta memahami mekanisme penggunaan melalui pengalaman, bukan hanya penjelasan teoretis.



Gambar 3. Sosialisasi dan Praktik Penggunaan Aplikasi Monitoring Capaian Output Kinerja

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Rekapitulasi Capaian

Capaian ketiga aksi utama dirangkum pada Tabel 3 dengan status sesuai bukti yang tersedia.

Tabel 3. Rekapitulasi Capaian Aksi/Program Pengabdian

Program	Realisasi	Luaran	Status Capaian
Pelaksanaan FGD	Dilaksanakan 11 September 2026 dengan 15 peserta dan satu narasumber KPPN	Resume hasil FGD dan dokumentasi; masukan tentang perencanaan, pelaporan, dan monitoring	Terlaksana
Pengembangan aplikasi monitoring	Aplikasi dikembangkan dengan tenaga berkompetensi teknologi informasi	Aplikasi dengan dashboard dan fitur IKPA Capaian Output	Produk tersedia; efektivitas belum dievaluasi
Sosialisasi dan praktik aplikasi	Sosialisasi, demonstrasi, dan praktik langsung dilaksanakan	Pengalaman awal peserta menggunakan fitur aplikasi	Terlaksana; penguasaan pengguna belum diukur

Pembahasan: Perubahan pada Empat Aspek

Pada aspek sumber daya manusia, penguatan dilakukan melalui pendalaman materi, pertukaran pengalaman, dan praktik aplikasi. Karena tidak ada pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, capaian yang dapat dipastikan adalah terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas dan keterlibatan peserta, bukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara kuantitatif. Pada aspek kelembagaan sosial, pengabdian mempertemukan tim keuangan, tim perencanaan, dan narasumber KPPN sehingga terjadi pertukaran informasi dan penguatan hubungan kerja; sejalan dengan Emery dan Flora (2006), pengalaman internal dihubungkan dengan jejaring eksternal dan keahlian teknis. Dalam kerangka Arnstein (1969), peserta memberi masukan sehingga kegiatan tidak sepenuhnya satu arah, namun keterlibatan menyampaikan masukan belum setara dengan kewenangan menetapkan keputusan.

Pada aspek kebijakan, pengabdian tidak menghasilkan perubahan peraturan formal; hasil FGD berupa masukan dan rekomendasi yang penerapannya masih memerlukan keputusan pihak berwenang. Pada aspek infrastruktur, aplikasi pada modul SIPERINTIS menjadi perubahan nyata berupa tambahan sarana digital pengendalian kinerja. Namun, menurut *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989) dan UTAUT (Venkatesh et al., 2003), penerimaan teknologi bergantung pada persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung. Karena tidak digunakan instrumen pengukuran penerimaan teknologi, kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna belum dapat disimpulkan secara empiris, dan sosialisasi dipahami sebagai tahap awal penerimaan teknologi, bukan bukti pemakaian berkelanjutan.

Evaluasi, Keberlanjutan, dan Keterbatasan

Evaluasi menunjukkan keterlaksanaan kegiatan (FGD dengan 15 peserta, resume pembahasan, dan praktik aplikasi) serta tersedianya produk pengabdian. Evaluasi belum menghasilkan data pembanding untuk mengukur peningkatan kompetensi, efektivitas aplikasi, atau perubahan nilai IKPA. Keberlanjutan diarahkan pada pemanfaatan aplikasi oleh tim keuangan dan tim perencanaan, yang memerlukan penanggung jawab yang jelas, pembaruan data berkala, pemeliharaan teknis, dan dukungan kelembagaan; mekanisme serah terima dan penetapan pengelola aplikasi secara formal masih memerlukan tindak lanjut. Aplikasi berpeluang direplikasi pada unit kerja lain dengan menyesuaikan kebutuhan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

pengguna dan sistem pelaporan yang berlaku. Keterbatasan utama adalah belum adanya pengukuran perubahan kinerja secara kuantitatif dan evaluasi penggunaan jangka panjang.

SIMPULAN

Pengabdian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pengelolaan kinerja kelembagaan di IAIN Parepare melalui pendekatan ABCD. FGD dengan tim keuangan dan tim perencanaan serta narasumber KPPN Parepare menghasilkan masukan tentang penyusunan rencana kegiatan yang terstruktur, pemutakhiran RPD, ketepatan waktu pelaporan, dan kebutuhan instrumen monitoring internal. Capaian utamanya adalah aplikasi monitoring capaian output kinerja pada modul SIPERINTIS yang telah diperkenalkan melalui sosialisasi dan praktik langsung. Tujuan pengabdian tercapai pada tingkat pelaksanaan dan penyediaan luaran, sedangkan peningkatan nilai IKPA, perubahan budaya kerja, dan dampak terhadap mutu layanan belum dapat dinyatakan terukur dan memerlukan evaluasi lanjutan. Direkomendasikan agar pimpinan menetapkan penanggung jawab pengelolaan aplikasi, tim keuangan dan tim perencanaan memperkuat koordinasi penyusunan rencana kegiatan, RPD, dan pelaporan berkala, serta dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah pada pendampingan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review, 66*(s1), 44–55. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems, 19*(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Laporan tren kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Emery, M., & Flora, C. (2006). Spiraling-up: Mapping community transformation with community capitals framework. *Community Development, 37*(1), 19–35. https://doi.org/10.1080/15575330609490152

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.

IAIN Parepare. (2024). *Rencana strategis (Renstra) IAIN Parepare tahun 2020–2024*. IAIN Parepare.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard—Measures that drive performance. *Harvard Business Review, 70*(1), 71–79.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). *Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies*. Harvard Business School Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana strategis satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama*.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2023 tentang tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga*.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923